

## Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Dalam Ekonomi Dan Politik Terhadap Pembangunan Perempuan di Provinsi Sumatera Barat

Elsa Yunara<sup>1</sup>, Isra Yeni<sup>2</sup>, Muhammad Irfan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Indonesia

\*Korespondensi: [elsayunara17@gmail.com](mailto:elsayunara17@gmail.com), [israyeni1991@fe.unp.ac.id](mailto:israyeni1991@fe.unp.ac.id)

### Info Artikel

**Diterima:**

22 Mei 2023

**Disetujui:**

29 Juni 2023

**Terbit daring:**

01 Juni 2023

**DOI: -**

**Sitasi:**

Yunara, E, Yeni, I, & Irfan, M, (2023). Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Dalam Ekonomi Dan Politik Terhadap Pembangunan Perempuan di Provinsi Sumatera Barat, 5(2).

### Abstract

*Sustainable economic development requires people who are able and empowered to meet their needs and escape from poverty. It can be seen that the HDI for women is always below the HDI for men every year. This study aims to identify women's empowerment in the economy and politics can improve women's development in West Sumatra. With the Panel Least Squares (PLS) method then proceed with the classical assumption test, with a panel regression model. Research on 19 districts/cities in West Sumatra with a span of 5 years. The results showed that female professional staff, women's income contribution had a positive and significant effect on women's development, women entrepreneurs had a negative and insignificant effect on women's development, women in parliament had a positive and insignificant effect on women's development in West Sumatra. It can be concluded that women's empowerment in the economy and politics is very important for the development of a country. From the results of this study it is suggested to the government to pay more attention to women's empowerment so as to achieve women's development and improve gender-equitable welfare.*

**Keyword :** Women's Development, Empowerment, Politics, Economy

### Abstrak

Dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dibutuhkan masyarakat yang mampu dan berdaya memenuhi kebutuhannya dan melepaskan diri dari kemiskinan, dilihat dari IPM perempuan selalu berada di bawah IPM laki-laki tiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemberdayaan perempuan dalam ekonomi dan politik dapat meningkatkan pembangunan perempuan di Sumatera Barat. Dengan metode Panel Least Squares (PLS) lalu dilanjutkan dengan uji asumsi klasik, dengan model regresi panel. Penelitian terhadap 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan rentang waktu 5 tahun. Hasil penelitian menunjukkan tenaga profesional perempuan, sumbangan pendapatan perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan perempuan, pengusaha perempuan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembangunan perempuan, perempuan di parlemen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembangunan perempuan di Sumatera Barat. Dapat disimpulkan pemberdayaan perempuan dalam ekonomi dan politik sangatlah penting untuk pembangunan suatu Negara. Dari hasil penelitian ini disarankan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan pemberdayaan perempuan sehingga tercapai pembangunan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan gender.

**Kata Kunci :** Pembangunan Perempuan, Pemberdayaan, Politik, Ekonomi

**Kode Klasifikasi JEL:** A20, P00, P46

## PENDAHULUAN

Pembangunan perempuan merupakan bagian dari pembangunan manusia berbasis gender. Pembangunan perempuan memiliki dampak terhadap kualitas yang dimilikinya sehingga perempuan mampu menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan dan perempuan yang berkualitas turut mempengaruhi kualitas generasi penerus dalam pengembangan sumber daya manusia dimasa depan. Pembangunan perempuan dengan kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan pada tahun 2030 sejalan dengan salah satu tujuan SDGs (*Sustainable Development Goals*) (Kementerian PPPA, 2020). Meskipun saat ini upaya untuk meningkatkan peran dan kualitas perempuan dalam pembangunan telah banyak dilakukan, namun kesenjangan gender masih terjadi.

Kesenjangan gender merupakan kondisi dimana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Dikarenakan perbedaan peran, tanggung jawab, kedudukan, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Ketidakadilan gender diakibatkan oleh kondisi ketidakadilan dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut (BPS, 2022).

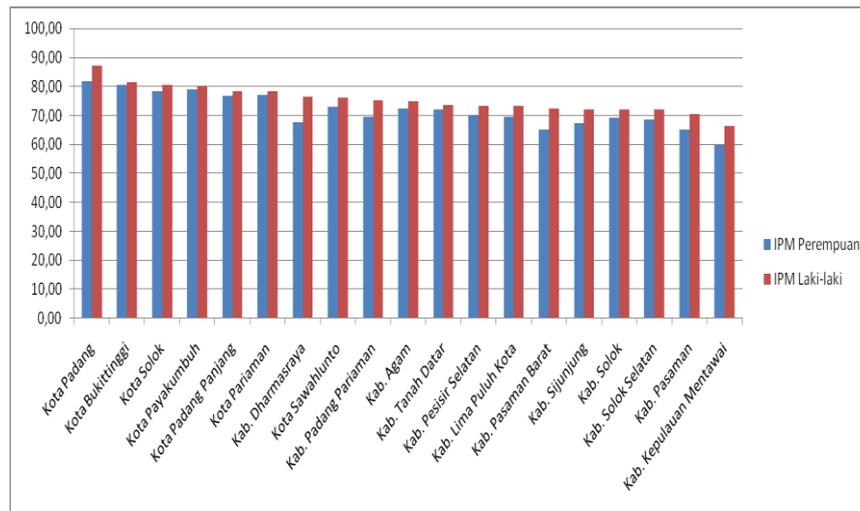
Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa ketimpangan gender dalam pendidikan dan ketenagakerjaan memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang hilang akibat ketimpangan gender dalam ketenagakerjaan empat kali lebih besar dibandingkan ketimpangan gender dalam pendidikan (Klasen & Lamanna, 2009). Sementara itu, (Amory, 2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ketimpangan gender dalam ketenagakerjaan perempuan masih rendah dan sangat jauh tertinggal dari laki-laki. (Aktaria & Handoko, 2012) juga menemukan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara ketimpangan gender yang diwakili oleh tiga indikator (*Gender Inequality Index (GII)*, *Gender Development Index (GDI)*, dan *Gender Empowerment Measure (GEM)*) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah provinsi kalimantan tengah. Artinya semakin tinggi ketimpangan gender di wilayah provinsi kalimantan tengah maka pertumbuhan ekonominya semakin menurun, begitu juga sebaliknya semakin rendah ketimpangan gender di wilayah provinsi kalimantan tengah maka pertumbuhan ekonominya semakin meningkat.

Sedangkan (Seguino, 2000) berpendapat lain tentang kesenjangan gender dalam upah, Seguino menyatakan bahwa kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki dalam pertumbuhan ekonomi di Asia memiliki dampak positif terhadap ekspor. Upah yang diberikan kepada perempuan di industri ekspor melengkapi kebijakan NIC (Negara Industri Baru) tingkat pertama, yang mengarahkan investasi ke industri yang ditargetkan dan membantu perusahaan naik tangga. Yang akan memicu penjualan ekspor, pada akhirnya merangsang penyediaan devisa yang diperlukan bagi perekonomian ini.

Secara agregat ketimpangan gender di Indonesia masih sangat memprihatinkan, pada tahun 2020 ketimpangan gender di Indonesia sembilan belas provinsi dari tiga puluh empat Provinsi masih dibawah nasional, dengan *Indek Pembangunan Gender (IPG)* terendah Provinsi Papua sedangkan IPG tertinggi Provinsi DI Yogyakarta, pembangunan yang merata antar wilayah merupakan salah satu tujuan dari pembangunan nasional (Kemenpppa, 2021), namun masih terdapat gap capaian manfaat hasil pembangunan yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan

dan kesehatan. Ini adalah fakta, meski ada kemajuan dalam kesetaraan gender akhir-akhir ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai wilayah/provinsi.

Salah satunya adalah provinsi Sumatera Barat, sebagai etnis minangkabau yang memiliki sistem sosial yang menempatkan perempuan pada posisi sentral. Seharusnya dengan sistem sosial ini kesetaraan gender dapat tercapai. Namun dalam kenyataannya, di Sumatera Barat kesetaraan gender belum dapat tercapai dengan baik. Salah satu buktinya dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia laki-laki dan perempuan kabupaten/kota di Sumatera Barat.



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2021

### Gambar 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa capaian indeks pembangunan manusia (IPM) perempuan dan laki-laki di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 belum merata. Dimana IPM tertinggi adalah kota padang, dengan IPM laki-laki sebesar 87,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya meningkat dari 86,97 persen menandakan bahwa IPM laki-laki naik sebesar 0,08 persen. Sedangkan IPM perempuan sebesar 81,66 persen juga mengalami peningkatan sebesar 0,22 persen dibandingkan tahun sebelumnya di angka 81,44 persen. Dengan IPM terendah adalah kabupaten kepulauan mentawai, dengan IPM laki-laki sebesar 66,43 persen dibandingkan tahun sebelumnya meningkat dari 66,17 persen angka ini menandakan bahwa IPM laki-laki naik sebesar 0,26 persen dan IPM perempuan sebesar 59,66 persen juga mengalami peningkatan sebesar 0,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya di angka 59,28 persen. Meskipun mengalami peningkatan pada tiap kabupaten/kota capaian IPM perempuan selalu berada di bawah IPM laki-laki Dimana hal ini menjadi bukti bahwa di Sumatera Barat kedudukan perempuan masih belum setara dengan laki-laki. Kondisi ini berkaitan erat dengan konstruksi sosial patriaki yang menempatkan posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki.

Salah satu penyebab utamanya rendahnya IPM perempuan adalah masih rendahnya kontribusi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi maupun politik. Dalam bidang ekonomi, perempuan juga perlu diberikan kesempatan untuk menduduki posisi pengambilan keputusan, baik sebagai pengusaha ataupun pekerja. Memberikan akses kepada perempuan untuk lebih berpartisipasi dalam area publik seperti dunia kerja, bermanfaat baik untuk pengembangan kapasitas perempuan itu sendiri. Dengan hadirnya perempuan pasar tenaga kerja lebih kompetitif dan berwarna (Seguino, 2000).

Kontribusi perempuan di pasar tenaga kerja masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Salah satunya pada tenaga kerja profesional, dari tahun 2017 hingga 2019 tenaga kerja profesional perempuan di Sumatera Barat mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 57,64% di tahun 2017 menjadi 55,36% pada tahun 2019. Namun, di tahun 2020 mengalami peningkatan hingga 58,97%. Hal ini merupakan angka tertinggi sejak beberapa tahun terakhir, bahkan menjadi provinsi peringkat pertama yang menyumbang tenaga profesional perempuan tertinggi di Indonesia. Dapat diartikan bahwa secara bertahap pemberdayaan gender di Indonesia, terutama di Sumatera Barat mengalami kemajuan.

Namun dilihat dari persentase sumbangan pendapatan perempuan di Sumatera Barat dari tahun 2017 hingga 2020 mengalami peningkatan yang signifikan dari 37,40% di tahun 2017 menjadi 37,57% pada tahun 2020. Ini menandakan bahwa kesejahteraan perempuan di Provinsi Sumatera Barat dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Dapat diartikan bahwa secara bertahap pemberdayaan gender di Indonesia, terutama di Sumatera Barat mengalami kemajuan.

Namun dilihat dari persentase pengusaha perempuan di Sumatera Barat dari tahun 2017 hingga 2020 berfluktuasi, persentase pengusaha perempuan paling tinggi pada tahun 2018 sebesar 37,55% namun pada tahun selanjutnya turun hingga angka 34,97%, dalam empat tahun terakhir ini merupakan angka terendah. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 36,55%. Ini menandakan bahwa kesejahteraan perempuan di Provinsi Sumatera Barat ada peningkatan, namun peningkatannya belum stabil.

Faktor selanjutnya adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik (politik). Keterwakilan perempuan di parlemen diharapkan akan mendorong kesejahteraan kelompok perempuan. Dengan adanya perempuan di parlemen, maka ada perwakilan untuk mengawasi dan mempengaruhi kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap gender (Rahmaniah Syarifah Ema, 2016).

Ditingkat nasional menurut hasil pemilu di tahun 2019, wakil perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya 20,87 persen atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI. Sedangkan di tingkat daerah (di DPRD) sebesar 30,88 persen, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan hasil pemilu pada tahun 2014 sebesar 25,47 persen (BPS, 2021). Untuk di DPR angka ini masih jauh dari harapan Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang mengamanatkan minimal 30 persen wakil perempuan di parlemen. Di Sumatera Barat sendiri, wakil perempuan di parlemen sangat jauh di bawah laki-laki.

Berdasarkan data persentase perempuan di parlemen di provinsi Sumatera Barat tahun 2017 sampai 2020 lebih di dominasi oleh laki-laki. Anggota parlemen perempuan sangat jauh tertinggal jumlahnya dibandingkan dengan anggota parlemen laki-laki. Seperti yang terlihat pada tabel keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun 2017 sebesar 11% namun pada tahun 2020 keterlibatan perempuan menurun di angka 5%. Ini menandakan keterlibatan perempuan dalam politik masih sangat lemah, namun (Tusianti, 2021) mengatakan semakin banyaknya perwakilan perempuan di parlemen, maka kedudukan perempuan semakin kuat, termasuk untuk permasalahan yang dihadapi perempuan dapat disuarakan dan diselesaikan, terutama urusan kesejahteraan perempuan yang dipandang belum merata dan setara dengan laki-laki.

**Tabel 1 Perkembangan Tenaga Profesional Perempuan, Sumbangan Pendapatan Perempuan, Pengusaha Perempuan dan Perempuan di Parlemen di Sumatera Barat Tahun 2017 sampai 2020**

Tahun	2017	2018	2019	2020
Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	57,64	55,48	55,36	58,97
Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	37,40	37,48	37,51	37,57
Persentase Pengusaha Perempuan	35,94	37,55	34,97	36,55
Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	11	11	5	5

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2021

Pemberdayaan perempuan dalam ekonomi merupakan suatu proses agar perempuan memiliki daya dan kekuatan untuk lebih berkualitas, dan menghilangkan ketergantungan serta melepaskan diri dari kemiskinan (Gerrity et al., 2007). Kesetaraan gender menjadi salah satu solusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, pencapaian kesetaraan gender artinya menghilangkan kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan disegala bidang (Arifin, 2018). Sedangkan, pemberdayaan perempuan dalam politik bermakna keterlibatan perempuan dalam dunia politik untuk menyampaikan permasalahan perempuan dan lebih memahami dalam membuat kebijakan yang pro perempuan serta berperan langsung dalam pengambilan keputusan yang adil bagi perempuan (World bank Report 2011, 2011). Sedangkan (Kertati, 2019) Menyatakan ada keterkaitan antara keterwakilan politik dengan pemberdayaan perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen sebagai indikator bagi pencapaian IDG memberikan dampak positif terhadap pembangunan perempuan.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang: Pengaruh tenaga profesional perempuan, sumbangan pendapatan perempuan, pengusaha perempuan, perempuan di parlemen terhadap pembangunan perempuan di provinsi Sumatera Barat. Manfaat penelitian sebagai referensi pengetahuan untuk pengembangan ilmu ekonomi sumber daya dan ilmu ekonomi pembangunan dan dapat memberikan gambaran serta masukan bagi pemerintah atau instansi terkait selaku pengambil kebijakan agar bisa melihat lebih cermat tentang pengaruh pemberdayaan perempuan dalam ekonomi dan politik terhadap pembangunan perempuan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data panel 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dari tahun 2017-2021. Dengan variabel bebas Tenaga Profesional Perempuan (X1), Sumbangan Pendapatan Perempuan (X2), Pengusaha Perempuan (X3) mewakili pemberdayaan perempuan dalam ekonomi dan Perempuan di Parlemen (X4) mewakili pemberdayaan perempuan dalam politik, dan variabel terikat Pembangunan Perempuan (Y). Dengan metode analisis regresi panel *Panel Least Squares (PLS)*, dengan uji pemilihan *Fixed Effect Model (FEM)*. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh X1, X2, X3, X4 terhadap Y, dilanjutkan dengan Uji Asumsi Klasik yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas dan Uji Autokorelasi.

Model estimasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + U_{it} \quad (1)$$

Dimana (Y) adalah Pembangunan Perempuan, (X1) adalah Tenaga Profesional Perempuan, (X2) adalah Sumbangan Pendapatan Perempuan, (X3) adalah Pengusaha Perempuan, (X4) Perempuan di Parlemen, ( $\beta$ ) adalah konstanta, (t) adalah banyaknya waktu, (i) adalah banyaknya data, (e) adalah *error term*.

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif dan asosiatif. Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia. Dengan cara mengambil data dari publikasi BPS dan Kemen PPPA. Penelitian ini menggunakan data 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dengan rentang waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai 2021. Dengan indikator masing-masing variabel yaitu (Y) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berjenis kelamin perempuan, (X1) Persentase Tenaga Profesional Perempuan, (X2) Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan, (X3) Persentase Pengusaha Perempuan, (X4) Persentase Perempuan di Parlemen,

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dibutuhkan masyarakat yang mampu dan berdaya memenuhi kebutuhannya dan melepaskan diri dari kemiskinan sehingga meningkatkan taraf hidup. Salah satunya dengan pemberdayaan perempuan dalam ekonomi dan politik. dengan diwakili oleh variabel bebas Tenaga Profesional Perempuan (X1), Sumbangan Pendapatan Perempuan (X2), Pengusaha Perempuan (X3) mewakili pemberdayaan perempuan dalam ekonomi dan Perempuan di Parlemen (X4) mewakili pemberdayaan perempuan dalam politik, dan variabel terikat Pembangunan Perempuan (Y).

Berdasarkan dari hasil output analisis data serta pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, memperlihatkan bahwa tenaga profesional perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan perempuan di Sumatera Barat. Dengan koefisien regresi 0.0313, artinya apabila tenaga profesional perempuan meningkat sebesar 1 persen maka pembangunan perempuan di Sumatera Barat akan meningkat sebesar 0.0313 persen.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tusianti, 2021) yang menemukan bahwa perempuan sebagai tenaga kerja profesional berpengaruh positif terhadap IPM perempuan. Perempuan sebagai tenaga kerja profesional pada umumnya mempunyai pemasukan yang lebih tinggi dan pendidikan yang tinggi, hal inilah yang mendorong meningkatnya pembangunan perempuan baik pada dimensi pendidikan maupun ekonomi. hasil penelitian ini sejalan dengan teori ekonomi pembangunan yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan suatu Negara apabila kemampuan masyarakatnya yang meningkat untuk memenuhi kebutuhannya (Todaro, 2003). Dengan meningkatnya tenaga kerja profesional perempuan hal ini menandakan pemberdayaan perempuan akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga akan meningkatkan pembangunan perempuan itu sendiri dan pada akhirnya meningkatnya pembangunan berkelanjutan di Sumatera Barat.

Penelitian ini juga sejalan dengan teori (George J. Borjas, 2013) yang menyatakan bahwa selain modal manusia tenaga kerja berkemampuan tinggi akan mendapatkan upah yang besar sedangkan pekerja dengan berkemampuan rendah akan mendapatkan upah yang kecil. Artinya ketika perempuan bekerja sebagai tenaga kerja profesional maka perempuan tersebut bekerja dengan keahlian khusus yang menjadi karakteristik yang meningkatkan produktifitas dan pendapatannya.

Berdasarkan hasil regresi estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) pada tabel 2 maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 12.1273 + 0.0313X_1 + 1.6551X_2 - 0.0129X_3 + 0.0291X_4 \quad (2)$$

**Tabel 2 Hasil Output *Fixed Effect Model* (FEM)**

Dependent Variable: Y  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 10/24/22 Time: 07:11  
 Sample: 2017 2021  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 19  
 Total panel (balanced) observations: 95

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.12734	5.970196	2.031314	0.0459
X1	0.031317	0.010639	2.943652	0.0044
X2	1.655111	0.171319	9.660982	0.0000
X3	0.012976	0.017103	-0.758681	0.4505
X4	0.029127	0.021009	1.386419	0.1699

Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.996434	Mean dependent var	71.0958	9
Adjusted R-squared	0.995345	S.D. dependent var	5.87670	8
S.E. of regression	0.400970	Akaike info criterion	1.217138	1.83544
Sum squared resid	11.57592	Schwarz criterion	5	1.46698
Log likelihood	34.81404	Hannan-Quinn criter.	0	2.14148
F-statistic	914.5321	Durbin-Watson stat	0	0.00000
Prob(F-statistic)	0			

Sumber: Hasil Olahan Data Eviews 8, 2022

Berdasarkan hasil output analisis data penelitian serta uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa sumbangan pendapatan perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan perempuan di Sumatera Barat. Dengan koefisien regresi 1.6551, artinya apabila sumbangan pendapatan perempuan meningkat sebesar 1 persen maka pembangunan perempuan di Sumatera Barat akan meningkat sebesar 1.6551 persen. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa partisipasi perempuan dalam sumbangan pendapatan keluarga mampu memberikan pengaruh besar terhadap pembangunan perempuan di Sumatera Barat di bandingkan variabel lainnya dalam penelitian ini. Dengan meningkatnya persentase sumbangan pendapatan perempuan menunjukkan keberdayaan perempuan berperan dan berkontribusi secara finansial dalam keluarga. Sumbangan pendapatan perempuan juga mengindikasikan adanya kemandirian perempuan secara ekonomi yang dapat berdampak pada relasi yang lebih setara. Sehingga

meningkatkan sumber daya manusia yang tentunya akan meningkatkan pembangunan perempuan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan teori kesetaraan gender (Washington, 2005) yang mengatakan bahwa kesetaraan gender adalah bagian penting dari strategi pembangunan yang mengupayakan pemberdayaan semua orang untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup. Artinya dengan meningkatnya kemampuan perempuan dalam sumbangan pendapatan keluarga mengindikasikan bahwa perempuan tersebut berdaya secara ekonomi yang mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga tidak mengharapkan pendapatan dari suami (laki-laki) saja, pada akhirnya berdampak pada kesetaraan gender.

Berdasarkan hasil output analisis data penelitian serta uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa pengusaha perempuan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pembangunan perempuan di Sumatera Barat. Dengan koefisien regresi  $-0.0129$ , artinya apabila pengusaha perempuan meningkat sebesar 1 persen maka pembangunan perempuan di Sumatera Barat akan menurun sebesar  $0.0129$  persen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Herlina, 2016) yang berpendapat bahwa kesempatan kerja perempuan menikah di Kabupaten Cirebon pada umumnya mereka memilih bekerja dan pekerjaan yang dipilih adalah sektor informal sebagai pekerjaan yang banyak dimasuki karena sektor ini tidak membutuhkan banyak persyaratan seperti sektor formal. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja perempuan sebagai pengusaha merupakan pekerjaan yang termasuk kedalam sektor informal, tidak meningkatkan pembangunan perempuan dikarenakan tenaga kerja yang memilih bekerja sebagai pengusaha baik bekerja sendiri, bekerja dibantu buruh tidak tetap maupun bekerja dibantu buruh tetap kebanyakan pendidikan rendah dan penghasilan yang didapatkan tidak menentu. Sedangkan ukuran dalam pembangunan perempuan yang digunakan adalah harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran perkapita. Sedangkan perempuan yang bekerja sebagai pengusaha kebanyakan berpendidikan rendah dan pendapatan yang didapat juga tidak menentu. Hal ini menjadikan bahwa pengusaha perempuan berpengaruh negatif terhadap pembangunan perempuan di Sumatera Barat namun pengaruhnya tidak signifikan.

Berdasarkan hasil analisis data penelitian serta uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa perempuan di parlemen berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pembangunan perempuan di Sumatera Barat. Dengan koefisien regresi  $0.0291$ , artinya apabila pengusaha perempuan meningkat sebesar 1 persen maka pembangunan perempuan di Sumatera Barat akan meningkat sebesar  $0.0291$  persen. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori pemberdayaan perempuan (DIY, 2017) pemberdayaan perempuan merupakan upaya pempuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol termasuk dalam politik agar perempuan mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah. Dengan keterwakilan perempuan di parlemen mengindikasikan perempuan bias menyampaikan aspirasi dari kaumnya dalam pembuatan kebijakan-kebijakan untuk kaumnya sehingga bisa meningkatkan pembangunan perempuan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Tusianti, 2021) menemukan bahwa persentase perempuan di parlemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM perempuan. Dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam politik memberikan pengaruh pada kualitas perempuan tentunya akan meningkatkan pembangunan perempuan. Keberadaan perempuan dalam pemerintah dan kepemimpinan salah satunya di parlemen dapat memberikan aspirasi bagi perempuan itu sendiri. Sedangkan apabila perempuan ada di kursi legislatif dapat menghasilkan hukum dan peraturan yang komprehensif dalam membela dan menyelesaikan permasalahan kaumnya.

## SIMPULAN

Dapat disimpulkan pemberdayaan perempuan dalam ekonomi dan politik sangatlah penting untuk pembangunan suatu Negara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tenaga profesional perempuan, sumbangan pendapatan perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan perempuan, pengusaha perempuan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembangunan perempuan, perempuan di parlemen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembangunan perempuan di Sumatera Barat. Dari hasil penelitian ini disarankan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan pemberdayaan perempuan sehingga tercapai pembangunan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan gender.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aktaria, E., & Handoko, B. S. (2012). Ketimpangan Gender Dalam Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 13(2), 194.
- Amory, J. D. S. (2019). Peranan Gender Perempuan Dalam Pembangunan Di Sulawesi Barat Tahun 2016-2018. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1–15.
- Arifin, S. (2018). KESETARAAN GENDER DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA GENDER EQUALITY AND ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA Perekonomian global saat ini menuntut pembangunan ekonomi suatu negara harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam rangka mencapai kemajuan y. *Kajian*, 23(1), 27–41.
- BPS. (2021). *Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen), 2019-2020*. BPS Pusat.
- BPS. (2022). *Gender*. Badan Pusat Statistik.
- DIY, B. (2017). *Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat*.
- George J. Borjas. (2013). *Labor Economics* (6th ed., pp. 305–334). Douglas Reiner.
- Gerrity, J. C., Osborn, T., & Mendez, J. M. (2007). Women and Representation: A Different View of the District? *Politics and Gender*, 3(2), 179–200.
- Herlina, E. (2016). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja Wanita dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Cirebon. Oleh : Ellin Herlina Alumni Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Borobudur*.
- Kemennppa. (2021). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2021*.
- Kementerian PPPA. (2020). Pembangunan Manusia Berbasis Gender. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8(1), 15–21.
- Kertati, I. (2019). Kontribusi Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Dalam Indeks Pembangunan Gender (Idg). *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(1), 62–72.
- Klasen, S., & Lamanna, F. (2009). The impact of gender inequality in education and employment on economic growth: New evidence for a panel of countries. *Feminist Economics*, 15(3), 91–132.
- Rahmaniah Syarifah Ema. (2016). *Pendidikan Politik Berperspektif Gender sebagai Solusi Meningkatnya Keterwakilan Perempuan di Parlemen*. Pontianak, Thetanjungpuratimes.Com.
- Seguino, S. (2000). Accounting for gender in asian economic growth. *Feminist Economics*, 6(3), 27–58.
- Todaro. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (kedelapan). Erlangga.
- Todaro. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (ke sembilan).
- Tusianti, E. (2021). Apakah Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi dan Politik Telah Meningkatkan IPM Perempuan Indonesia? Does Empowerment of Women in Economy and Politics Have Enhanced HDI of Indonesian Women? *Pendahuluan*. 21(2), 204–219.
- Washington. (2005). *Engendering Development: Pembangunan Berperspektif Gender*

*(Melalui perspektif gender dalam hak, sumberdaya, dan aspirasi)* (R. Yulfita (ed.)).  
Dian Rakyat.

World bank Report 2011. (2011). 2011 58988.

Zimmerman, L. A., Koenig, L. R., Pulerwitz, J., Kayembe, P., Maddeleno, M., & Moreau, C. (2021). The Intersection of Power and Gender: Examining the Relationship of Empowerment and Gender-Unequal Norms Among Young Adolescents in Kinshasa, DRC. *Journal of Adolescent Health*, 69(1), S64–S71.

Zubaedi. (2013). *BUKU PENGEMBANGAN MASYARAKAT.pdf* (p. 270).